

PERAN PEMERINTAH DALAM PENYEDIAAN BARANG DAN JASA PUBLIK

MHD. Ali Muhdor¹, Hendra Riofita²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: hajiyoza@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik guna mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Barang dan jasa publik, seperti pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur, dan administrasi publik, memiliki karakteristik non-rivalrous dan non-excludable, sehingga tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Melalui pendekatan kajian literatur (literature review), penelitian ini mengkaji berbagai teori, kebijakan, dan studi sebelumnya yang relevan untuk memahami tantangan serta strategi optimal dalam penyediaan layanan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, menjamin pemerataan akses, serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, peran pemerintah sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana harus didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, serta pemanfaatan teknologi digital. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta, evaluasi kebijakan secara berkala, serta prioritas pada daerah tertinggal untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik.

Kata Kunci: Barang Publik, Jasa Publik, Peran Pemerintah, Kegagalan Pasar, Tata Kelola, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract – *This study aims to analyze the strategic role of government in the provision of public goods and services in order to realize welfare and social justice for the entire community. Public goods and services, such as education, health services, infrastructure, and public administration, have non-rivalrous and non-excludable characteristics, so they cannot be completely left to market mechanisms. Through a literature review approach, this study examines various theories, policies, and previous studies that are relevant to understanding the challenges and optimal strategies in the provision of public services. The results of the study indicate that government intervention is very much needed to overcome market failures, ensure equal access, and support sustainable development. In addition, the role of government as a regulator, facilitator, and implementer must be supported by good governance, transparency, and the use of digital technology. This study recommends increasing collaboration with the private sector, periodic policy evaluations, and prioritizing disadvantaged areas to improve the quality and effectiveness of public services.*

Keywords: Public Goods, Public Services, Role Of Government, Market Failure, Governance, Public Welfare.

PENDAHULUAN

Pemerintah sangat bertanggung jawab atas ketersediaan dan penyediaan barang publik. Ketersediaan barang publik merupakan salah satu tanggung jawab utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Barang publik adalah barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, seperti jalan raya, pertahanan nasional, dan layanan kesehatan. Peran pemerintah dalam menjamin ketersediaan barang publik ini menjadi sangat penting, terutama karena sektor swasta tidak selalu mampu atau bersedia menyediakan barang-barang tersebut secara memadai. Penyediaan barang publik dalam jumlah yang besar membuat kriteria barang publik wajib untuk diprioritaskan, sehingga semua kebutuhan masyarakat akan barang publik mampu dipenuhi oleh pemerintah. Barang publik memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Pentingnya peran pemerintah dalam penyediaan barang publik tidak bisa dipisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, barang publik didefinisikan sebagai barang yang dapat dinikmati oleh semua orang tanpa mengurangi ketersediaannya bagi orang lain, Maningsih, S. (2024). yang dikenal dengan karakteristik non-rivalrous dan non-excludable. Ini berarti bahwa penggunaan barang publik oleh satu individu tidak mengurangi akses individu lain terhadap barang tersebut, dan tidak ada individu yang dapat dibatasi dari mengakses. Pemerintah harus melaksanakan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam proses penyediaan barang publik. Fungsi alokasi berhubungan dengan cara pemerintah menentukan jenis dan jumlah barang publik yang perlu disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Fungsi distribusi berfokus pada pemerataan akses dan manfaat dari barang publik, sedangkan fungsi stabilisasi berkaitan dengan pemeliharaan keseimbangan ekonomi dan sosial melalui penyediaan barang publik yang memadai. Dengan memahami peran ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana pemerintah dapat meningkatkan efektivitas layanan publik dan memenuhi ekspektasi masyarakat. (Hendra Riofita, 2024) Penelitian ini akan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam penyediaan barang publik serta strategi yang bisa diterapkan untuk mengoptimalkan perannya. Menurut ahli ekonomi, Samuelson, barang publik memiliki karakteristik non-rivalitas dan non-eksklusivitas. Non-rivalitas berarti konsumsi barang publik oleh seseorang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsinya. Sementara non-eksklusivitas berarti tidak ada cara untuk mencegah seseorang mengonsumsi barang publik, bahkan jika orang tersebut tidak membayar. Pemerintah dapat mengatasi masalah non-rivalitas dan non-eksklusivitas melalui penyediaan langsung, subsidi, atau regulasi. (Sarah Bakara, 2024).

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kebutuhan akan barang dan jasa publik merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Barang dan jasa publik seperti jalan raya, jembatan, pendidikan, layanan kesehatan, keamanan, dan kebersihan lingkungan adalah kebutuhan mendasar yang menunjang kesejahteraan masyarakat secara luas. Tidak seperti barang dan jasa privat yang bisa dipenuhi melalui mekanisme pasar secara langsung, barang dan jasa publik memiliki karakteristik khusus yang membuat penyediaannya tidak selalu menguntungkan secara ekonomi bagi pihak swasta. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran sentral dan strategis dalam memastikan tersedianya barang dan jasa publik secara adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup aspek sosial, politik, dan keadilan. Dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state), pemerintah dituntut untuk hadir secara aktif dalam menjamin hak-hak dasar warga negara melalui penyediaan layanan publik yang berkualitas. Hal ini menjadi penting mengingat mekanisme pasar seringkali gagal dalam menciptakan keadilan distribusi, terutama bagi kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong lemah atau tinggal di wilayah terpencil. Salah satu alasan utama perlunya campur tangan pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa

publik adalah karena adanya konsep market failure atau kegagalan pasar. Dalam banyak kasus, sektor swasta enggan atau bahkan tidak mampu menyediakan barang dan jasa publik karena tidak adanya insentif keuntungan yang jelas. Misalnya, pembangunan jalan di daerah pedalaman mungkin tidak akan dilirik oleh investor swasta karena biaya yang tinggi dan potensi keuntungan yang rendah. Dalam situasi seperti ini, pemerintah memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk hadir dan mengisi kekosongan tersebut demi tercapainya pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana dalam penyediaan barang dan jasa publik. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan kebijakan, peraturan, dan standar pelayanan agar tercipta keadilan dan transparansi. Sebagai fasilitator, pemerintah mendorong partisipasi swasta atau kerja sama publik-swasta dalam penyediaan layanan publik yang lebih efisien. Dan sebagai pelaksana, pemerintah melalui kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah, langsung terlibat dalam penyediaan dan distribusi barang serta jasa yang dibutuhkan masyarakat. Tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan peran ini tentu tidak sedikit. Mulai dari keterbatasan anggaran, birokrasi yang lambat, hingga adanya praktik korupsi yang menghambat efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), transparansi anggaran, serta penguatan kapasitas institusi publik agar penyediaan barang dan jasa publik dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan.

Dengan demikian, peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik bukan hanya sebagai pelengkap dari mekanisme pasar, tetapi merupakan inti dari fungsi negara dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Peran ini akan semakin signifikan di tengah tantangan globalisasi, urbanisasi, dan perubahan iklim yang menuntut respons cepat dan kebijakan publik yang adaptif. Oleh karena itu, memahami dan mengkaji lebih dalam mengenai peran pemerintah dalam konteks ini menjadi hal yang sangat relevan, baik dari segi akademis maupun praktik kebijakan publik di lapangan.

LITERATUR REVIEW

Peran Pemerintah

Peran pemerintah adalah serangkaian fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan yang dijalankan oleh lembaga eksekutif negara dalam mengatur, mengelola, dan melayani masyarakat guna mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan umum, keadilan sosial, serta ketertiban dan keamanan nasional. Peran ini mencakup berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan infrastruktur. Dalam konteks kenegaraan, pemerintah tidak hanya bertindak sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga sebagai pengatur (regulator), pengawas (controller), dan pelayan publik (public servant).

Peran pemerintah menjadi sangat penting ketika pasar gagal memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Dalam situasi seperti ini, pemerintah hadir untuk menjamin agar hak-hak dasar warga negara tetap terpenuhi, terutama dalam hal penyediaan barang dan jasa publik. Peran ini juga mencakup upaya menciptakan stabilitas ekonomi, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memperkuat integrasi nasional. (Hendra Riofita, 2024).

Penyediaan Barang dan Jasa Publik

Penyediaan barang dan jasa publik adalah suatu proses di mana pemerintah atau pihak yang diberi wewenang menyediakan berbagai kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat secara luas, tanpa memperhitungkan kemampuan individu untuk membayar. Barang dan jasa publik ini bersifat non-eksklusif (tidak dapat dikecualikan penggunaannya) dan non-rival (penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaannya bagi orang lain), sehingga penyediaannya tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Barang dan jasa publik mencakup berbagai aspek yang menyangkut kepentingan umum,

seperti jalan raya, jembatan, penerangan jalan umum, pendidikan dasar, layanan kesehatan, keamanan, kebersihan lingkungan, dan pelayanan administrasi publik. Dalam banyak kasus, sektor swasta tidak tertarik menyediakan layanan-layanan tersebut karena tidak memberikan keuntungan langsung, atau karena biaya penyediaannya sangat tinggi dibandingkan dengan potensi pendapatan yang dihasilkan. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk memastikan bahwa barang dan jasa tersebut tetap tersedia dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara merata.

Penyediaan barang dan jasa publik tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan fisik masyarakat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya. Dalam konteks ini, pemerintah bertindak sebagai penyedia langsung (provider), pengatur (regulator), dan juga sebagai pengawas (supervisor) terhadap kualitas dan keadilan distribusi barang dan jasa publik tersebut. Menurut pandangan ekonomi publik, penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi kegagalan pasar (market failure), yaitu kondisi ketika pasar tidak mampu mendistribusikan sumber daya secara efisien atau adil. Misalnya, tanpa intervensi pemerintah, tidak semua anak-anak akan mendapatkan pendidikan yang layak atau akses terhadap layanan kesehatan yang memadai, karena pertimbangan biaya yang tidak bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Selain itu, penyediaan barang dan jasa publik juga berfungsi untuk menciptakan stabilitas sosial dan pemerataan pembangunan, terutama di daerah-daerah yang secara geografis atau ekonomi kurang berkembang. Pemerintah berperan menjembatani kesenjangan antara kelompok masyarakat yang mampu dan tidak mampu, serta antara wilayah perkotaan dan pedesaan, melalui penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang adil dan merata.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian berbentuk kajian literatur atau literature review. Kajian literatur adalah proses analisis terhadap teori, hasil penelitian, dan referensi lain yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Kajian ini berisi ringkasan dan evaluasi penulis terhadap berbagai sumber referensi (seperti artikel, buku, dan informasi dari internet) yang terkait dengan topik yang dibahas. Proses studi literatur melibatkan kegiatan membaca, mendokumentasikan, dan mencernakan materi penelitian. Peneliti memilih metode ini karena kajian literatur membantu dalam menganalisis, mengevaluasi, serta merangkum penelitian-penelitian sebelumnya terkait topik yang telah dipilih. Pendekatan ini bermanfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu topik. Peneliti memilih metode literature review karena memungkinkan pengumpulan, penilaian, dan analisis data dari berbagai sumber yang sudah tersedia, seperti artikel jurnal, buku, tesis, dan laporan penelitian sebelumnya. Dengan metode ini, peneliti dapat menggunakan pengetahuan yang telah ada untuk mendalami topik tertentu, meninjau kemajuan di bidang terkait, mengevaluasi metode penelitian yang telah diterapkan, dan mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Selain itu, metode ini memungkinkan peneliti menghemat waktu dan biaya dalam mengumpulkan data karena lebih berfokus pada analisis dan sintesis informasi yang sudah tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah memiliki peran strategis dan krusial dalam penyediaan barang dan jasa publik demi menjamin kesejahteraan masyarakat secara merata. Barang dan jasa publik adalah kebutuhan dasar yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar karena sifatnya yang non-rivalry (penggunaannya oleh satu individu tidak mengurangi ketersediaannya untuk individu lain) dan non-excludable (tidak ada orang yang dapat dikecualikan dari penggunaannya). Contoh barang dan jasa publik meliputi pendidikan,

kesehatan, infrastruktur, air bersih, pertahanan, keamanan, dan pelayanan administrasi publik. Dalam sistem ekonomi modern, pemerintah dipandang sebagai aktor utama yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan tersebut, baik melalui pembiayaan langsung, penyusunan regulasi, hingga pelaksanaan program-program sosial. Salah satu alasan utama mengapa pemerintah harus turun tangan dalam penyediaan barang dan jasa publik adalah karena pasar cenderung gagal dalam menyediakan layanan-layanan tersebut secara adil dan efisien. Fenomena kegagalan pasar (*market failure*) terjadi ketika pihak swasta tidak memiliki insentif untuk menyediakan barang dan jasa publik karena keuntungan finansial yang terbatas, atau bahkan tidak ada sama sekali. Misalnya, perusahaan swasta tidak akan membangun jalan di daerah terpencil yang minim penduduk karena tidak menguntungkan secara ekonomi, padahal jalan tersebut sangat penting bagi aksesibilitas dan pemerataan pembangunan. Di sinilah peran pemerintah menjadi vital untuk mengisi kekosongan tersebut melalui intervensi dan investasi publik.

Selain itu, penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah juga bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam banyak kasus, kelompok masyarakat miskin atau terpencil seringkali terpinggirkan dan tidak mampu mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan jika harus membelinya dengan harga pasar. Oleh karena itu, pemerintah hadir untuk menjamin bahwa semua warga negara, tanpa memandang status sosial dan ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap layanan-layanan tersebut. Kebijakan subsidi pendidikan, BPJS Kesehatan, pembangunan sekolah dan rumah sakit di daerah tertinggal, adalah bentuk konkret dari upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial melalui penyediaan barang dan jasa publik. Dalam konteks pembangunan nasional, peran pemerintah dalam penyediaan infrastruktur publik sangat menentukan arah dan kecepatan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, dan jaringan listrik adalah fondasi penting bagi aktivitas ekonomi. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, pelaku usaha akan mengalami hambatan dalam distribusi barang, mobilitas tenaga kerja, dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, investasi pemerintah dalam sektor infrastruktur publik sering kali menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Selain itu, pemerintah juga dapat menggandeng sektor swasta melalui skema kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) untuk mengoptimalkan pembiayaan dan efisiensi pembangunan infrastruktur. Namun, keberhasilan penyediaan barang dan jasa publik oleh pemerintah sangat bergantung pada kualitas tata kelola pemerintahan. Korupsi, birokrasi yang lambat, serta lemahnya sistem pengawasan dapat menyebabkan inefisiensi dalam penyediaan layanan publik. Dalam banyak kasus, anggaran besar yang dialokasikan untuk proyek publik tidak berdampak signifikan karena diselewengkan atau tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi elemen penting yang harus dijaga dalam setiap tahap penyelenggaraan pelayanan publik. Pemerintah juga perlu mengadopsi sistem evaluasi kinerja berbasis hasil agar kebijakan yang diterapkan benar-benar berdampak positif terhadap masyarakat.

Dalam era digital, transformasi teknologi juga membuka peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Melalui *e-government*, pemerintah dapat memberikan layanan administrasi yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat. Sistem digital seperti pelayanan pajak online, pendaftaran sekolah berbasis daring, hingga *telemedicine* di bidang kesehatan, merupakan inovasi yang memperluas akses masyarakat terhadap layanan publik. Digitalisasi juga memungkinkan pemerintah untuk mengumpulkan data yang lebih akurat dan *real-time*, sehingga kebijakan yang dibuat dapat lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian mengenai peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik sangat relevan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan publik serta memahami faktor-faktor yang mendukung atau

menghambat penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Dengan pendekatan penelitian kualitatif maupun kuantitatif, kita dapat mengeksplorasi sejauh mana pemerintah memenuhi tanggung jawabnya dan bagaimana persepsi masyarakat terhadap layanan yang mereka terima. Data empiris dari penelitian semacam ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Secara keseluruhan, peran pemerintah dalam penyediaan barang dan jasa publik tidak hanya penting, tetapi juga fundamental dalam mewujudkan negara yang adil dan sejahtera. Tanpa kehadiran pemerintah yang aktif dan bertanggung jawab, banyak kelompok masyarakat akan tertinggal dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penting bagi setiap pemerintahan untuk terus meningkatkan kapasitas dan integritasnya agar dapat memberikan layanan publik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemerintah memiliki peran yang sangat vital dalam penyediaan barang dan jasa publik sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di masyarakat. Barang dan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan administratif, tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar karena sifatnya yang non-rivalrous dan non-excludable. Oleh karena itu, intervensi pemerintah diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar, menjamin akses yang merata, serta menciptakan pemerataan pembangunan. Selain sebagai penyedia langsung, pemerintah juga berperan sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam menjamin kualitas dan efektivitas layanan publik. Keberhasilan peran ini sangat bergantung pada tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, akuntabilitas, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai peran tersebut, pemerintah dapat merumuskan kebijakan yang responsif dan inklusif demi meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.

SARAN

1. Peningkatan Tata Kelola

Pemerintah perlu memperkuat praktik good governance melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas birokrasi agar penyediaan barang dan jasa publik berjalan lebih optimal.

2. Pemanfaatan Teknologi Digital

Perluasan dan peningkatan penggunaan sistem digital seperti e-government harus dilakukan secara merata untuk mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan akurasi pengambilan keputusan berbasis data.

3. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Mendorong kolaborasi dengan sektor swasta melalui skema Public-Private Partnership (PPP) dapat menjadi strategi efektif untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur publik.

4. Pemerataan Akses

Pemerintah perlu memprioritaskan daerah terpencil atau tertinggal dalam penyediaan barang dan jasa publik untuk menjamin keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan wilayah.

5. Evaluasi Kebijakan Secara Berkala

Diperlukan sistem evaluasi berkala terhadap kebijakan penyediaan layanan publik agar dapat diukur efektivitas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Hendra Riofita. Augmenting Islamic Digital Payment Effect On Muslim Customer Purchase Decision On Micro, Small And Medium Enterprises' (Msmes) Products. Journal of Islamic Monetary

- Economics and Finance, Vol. 10, No. 4 (2024), pp. 735 – 758
- Hendra Riofita. Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. *Jurnal Ekonomi Indonesia* • Volume 13 Number 2, 2024: 137–151
- Maningsih, S. (2024). Analisis Peran Penting Barang Publik Dalam Masyarakat Kafalah: *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Keuangan Syariah*, 1(1), 23-30
- Refrenri D. Sumila. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pasar Tradisional (Studi di Pasar Langowan). *Jurnal Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT*
- Renaldi, Hendra Riofita. Pengaruh Penggunaan E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Pendidikan Ekonomi universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* Vol 8, No. 5 Mei 2024
- Riofita, Hendra, Strategi Pemasaran, (Pekan Baru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015) h.115
- Sarah Bakara, Maya Wulandari, Eliza Handayani Lubis, Armin Rahmansyah Nasution, Juanda Maulana, Siti Naila Rahmi, Jelita Simanungkalit. Analisis Peran Pemerintah Dalam Ketersediaan Barang Publik. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* Vol.4, No.1, Desember 2024
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Wirawijaya, I. (2022). Teori Barang Publik Yang Sulit Diimplementasikan. *Jurnal Al Mujaddid Humaniora*, 7(2), 106-110.
- Yani Alfian. Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Di Desa Ciharashas Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Volume 3 No. 1 Januari 2019